

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Republika

Pembiayaan Rumah DP Rp 0 Diserahkan ke Pengembang

■ ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

JAKARTA — Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta menyebut pembiayaan program rumah dengan uang muka atau *down payment* (DP) Rp 0 tetap bisa dilakukan dengan pihak ketiga. Hal itu menyusul tidak adanya usulan anggaran program rumah DP Rp 0 dalam APBD 2023.

"(Rumah DP Rp 0) dibiayai oleh pengembang, bisa oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta," kata Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta Sarjoko kepada *Republika*, Kamis (3/11).

Meskipun demikian, Pemprov DKI mengajukan anggaran sebesar Rp 176 miliar untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) yang disalurkan untuk program rumah DP Rp 0 pada 2023. "Ini investasi nonpermanen sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hu-

nian milik melalui skema perbankan," kata dia.

Usulan anggaran itu diajukan Pemprov DKI melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2023. Sarjoko menjelaskan, penempatan anggaran untuk FPPR rumah DP Rp 0 ada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemprov DKI bagian Pos Pembiayaan Pengeluaran. Pencairan anggaran itu berdasarkan pada permohonan oleh Badan Layanan Umum Unit Pengelola Dana Perumahan (BLU UPDP). "Sehingga diharapkan untuk memberikan bantuan kemudahan bagi warga DKI yang memenuhi ketentuan sebagai penerima manfaat," kata dia.

Adapun dana FPPR yang sudah dikelola oleh BLU UPDP sebesar Rp 550 miliar dan sudah tersalurkan sebanyak Rp 254,8 miliar untuk 948 penerima manfaat program DP Rp 0. Sar-

joko menjelaskan, saat ini, ada sisa anggaran di kas UPDP sebesar Rp 295,2 miliar yang akan digunakan untuk bantuan pembiayaan kepada penerima manfaat. Bantuan itu untuk hunian Tower Swasana Pondok Kelapa mencapai 480 unit dan Tower Kanaya Pondok Kelapa sebanyak 868 unit. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI hingga saat ini total realisasi unit dengan skema DP Rp 0 yang sudah dibangun mencapai 2.332 unit.

Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono belum memberikan tanggapan soal kelanjutan program rumah DP Rp 0 yang merupakan warisan dari mantan gubernur Anies Baswedan. Dia justru meminta pertanyaan soal program rumah DP Rp 0 ditujukan kepada BUMD DKI Sarana Jaya. "Kan kewenangan (pembangunan rumah DP Rp 0) Sarana Jaya," kata Heru. ■ **ed:** nur aini